

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam bahasa Yunani, demokrasi memiliki dua makna kata yaitu *demos* dan *kratos*. Pada definisinya sendiri *demos* memiliki arti sebagai rakyat, sedangkan untuk kata *kratos* sendiri memiliki definisi sebagai kuasa. UNESCO melakukan sebuah penelitian mengenai demokrasi yang dilakukan pada tahun 1949, output dari penelitian yang dilakukannya ialah menjelaskan bahwa demokrasi merupakan nama yang paling baik dan wajar untuk semua system organisasi politik serta social.<sup>1</sup>

Secara perkembangan awal-nya, demokrasi memiliki pertumbuhan yang mencakupi value yang diwariskan pada masa lampau. Hal tersebut membahas tentang demokrasi yang secara historisnya bermula pada budaya Yunani Kuno dan idea mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran Reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya.<sup>2</sup> Demokrasi merupakan sebuah bentuk konsep sederhana, yang dimana rakyat memiliki kuasa paling tinggi. Kemudian menurut *Abraham Lincoln*, demokrasi merupakan sebuah bentuk konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pada konteks demokrasi, dimana terdapat sebuah ciri-ciri yang menjelaskan secara konkrit mengenai ruang-ruang yang dimiliki konsep demokrasi bagi kepentingan

---

<sup>1</sup> S.I. Benn dan R.S. Peters, "Principles of Political Thought (New York: Collier Books, 1964) Hal. 393

<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, op. cit, Hal. 108

masyarakat khalayak umum. Oleh karena itu, dibawah ini penulis jabarkan tentang ciri-ciri dari demokrasi tersebut:

- Memiliki sebuah Perwakilan Rakyat
- Memiliki sebuah keputusan yang dilandasi oleh aspirasi dan kepentingan rakyat
- Menarapkan konstitusi
- Menjalankan pemilihan umum atau pesta demokrasi
- Memiliki system ke-partaian

Selain itu juga, di dalam sebuah demokrasi terdapat tujuan yang dapat menghadirkan kehidupan rakyat yang sejahterah, adil, serta Makmur. Untuk mengaktualisasi tujuan dari konsep demokrasi, dimana terdapat sebagai berikut:

- Kebebasan berpendapat
- Menciptakan keamanan dan ketertiban
- Mendorong masyarakat yang aktif dalam pemerintahan
- Membatasi kekuasaan pemerintah
- Mencegah perselisihan

Pada perkembangan demokrasi di Indonesia banyak sekali dinamika yang terjadi dalam setiap pemerintahan, dimana di setiap pemerintahan memiliki karakteristik demokrasi yang digunakannya. Kemudian juga perkembangan demokrasi di Indonesia sangat pelik dan rumit, hal itu dikarenakan terdapat masalah pokok yang selalu

mengahantui dalam kondisi masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya dan tingginya angka kemiskinan dikalangan masyarakat.<sup>3</sup>

Pada awal masa kemerdekaan, demokrasi di Indonesia seringkali terjadi perubahan-perubahan, secara catatan sejarah dimana demokrasi Indonesia telah berubah sebanyak empat kali dari berbagai macam rezim. Oleh karena itu, agar dapat lebih jelas penulis menjabarkannya sebagai berikut:

- Masa Bung Karno (Demokrasi Parlementer)
- Masa Bung Karno (Demokrasi Presidensial)
- Masa Pak Harto (Demokrasi Pancasila)
- Masa Reformasi (Demokrasi Tidak Langsung)

Ketika kita melakukan kilas balik sejarah mengenai sebuah ciri-ciri dari system demokrasi, dimana pemilihan umum merupakan salah satu aspek jalannya bagi system demokrasi itu sendiri. Sebab, secara fundamentalnya dimana rakyat merupakan salah satu dari pilar penting berjalannya sebuah system demokrasi. Apabila kita refleksikan dengan ciri-ciri system demokrasi, terdapat wajibnya sebuah negara untuk melakukan pemilihan umum. Selain itu, Pemilu merupakan sebuah bentuk upaya nyata dari demokrasi procedural, walaupun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum.

Akan tetapi, dalam menjalankan sebuah pemilihan umum tentu saja aspek demokratis menjadi pilar utamanya. Kemudian pada hal tersebut, setiap negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai sebuah tradisi dalam memilih legislative dan

---

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, op. cit, Hal. 127.

eksekutif.<sup>4</sup> Walaupun secara fundamentalnya semua negara yang menjalankan system demokrasi pasti akan melaksanakan pemilihan umum untuk dapat memilih para anggota legislatif beserta para pemimpin bagi bangsa ini. Sementara itu, dalam semua system demokrasi modern melakukan pemilihan umum. Namun, tidak semua negara yang menerapkan system demokrasi dapat menjalankan pemilu secara demokratis.

Oleh karena itu, dalam sebuah pemilihan yang demokratis tidak hanya sekedar memilih suatu lambang, tetapi pemilihan yang demokratis harus mampu kompetitif, berkala, inklusif (luas), dan definitif yakni menentukan kepemimpinan pemerintah. Pada teori yang dimiliki oleh **Adam Pzeworski** (1988), terdapat dua unsur variable yang dimana menjadi unsur terpenting dalam negara demokrasi. Yang *Pertama*, menurutnya pemilu merupakan sebuah mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai.

Maka dari itu, teori yang di utarakan Adam Pzeworski sebuah bentuk kekuasaan yang dimiliki tentu tidak diraih dengan sebuah kekerasan. Akan tetapi, sebuah kekuasaan dapat diraih dengan cara menarik simpatik rakyat untuk memilihnya dan hal ini merupakan upaya yang telah ada pada unsur-unsur dalam system demokrasi itu sendiri.

Pemilu dalam konteks ini, hendaknya melembagakan khususnya berkenaan dengan merebut dan mempertahankan kekuasaan agar konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Selain itu juga, menurut **Harmaily**

---

<sup>4</sup> Sayap Bening, "Pengertian Pemilu" <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-pengertian-pemilu>, 27/03/2023, Pukul: 04.15 WIB.

**Ibrahim** pemilu merupakan sebuah ruang untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di badan perwakilan rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan ruang kompetisi untuk menyalurkan kehendak rakyat, masyarakat dan bangsa guna mewujudkan tujuan bernegara.

Dalam konteks ilmu politik, dimana terdapat dua macam system pemilihan umum, dua system pemilihan umum tersebut ialah:

- *Single-Member Constituency* atau seringkali disebut system distrik, dimana pada system ini satu daerah pemilihan memilih satu wakil. Hal tersebut dikarenakan system distrik memiliki cakupan wilayah yang kecil, oleh karena itu system ini memilih satu wakil tunggal atas dasar pluralitas. Selain itu, system distrik adalah sebuah bentuk system pemilihan yang paling tua dan memiliki sebuah landasan atas kesatuan wilayah. Kemudian dalam sistem distrik, satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah, pada system distrik dimana terdapat hanya satu kursi untuk satu distrik, dan para peserta pemilu yang memperoleh suara terbanyak dapat menjadi pemenang yang absolut atau satu-satunya. Hal tersebut dapat dibidang sebagai *the first past the post* (FPTP).

- *Multi-Member Constituency* atau dapat dibidang sebagai system pemilihan umum proporsional, dimana dalam satu daerah pemilihan berhak untuk memilih beberapa wakil. Selain itu, system proporsional memiliki satu wilayah yang cakupannya besar untuk dapat menentukan beberapa wakil. Pada sebuah system proporsional, dimana satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan, dan dalam wilayah

tersebut jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para peserta, dalam tingkatan nasional, tanpa mengiraukan persebaran suara tersebut. Pada system proporsional ini, dimana terdapat 2 jenis yang dimana terdapat sebagai berikut:

- **Proporsional Terbuka**, pada system proporsional terbuka sendiri dimana dalam **metode pemberian suaranya** dengan cara konstituen dapat memilih salah satu nama peserta. Kemudian dalam **pengesahan calon** terpilih dengan berdasarkan hasil suara paling banyak, selain itu **derajat keterwakilan** system proporsional sendiri sangat besar, karena konstituen dapat bebas untuk memilih wakilnya yang akan duduk di kursi legislative secara langsung. Sehingga para konstituen dapat terus mengawasi orang yang telah dipilihnya. Selanjutnya dalam **ketingkatan kesetaraan calon** dalam system proporsional, dimana dapat menghadirkan kader yang tumbuh dan besar dari bawah dan menang karena adanya dukungan massa. **Kelebihan system proporsional terbuka** ialah: peserta dapat bersaing untuk melakukan mobilisasi dukungan massa, terbangun kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih, terbangun kedekatan. antarpemilih. **Kekurangan system proporsional terbuka** ialah: peluang terjadinya politik uang sangat tinggi, membutuhkan modal politik yang cukup besar, rumitnya penghitungan hasil suara, sulitnya mengeakkan kuota gender dan etnis.
- Proporsional Tertutup, dalam system proporsional tertutup dimana **metode pemberian suaranya** hanya kepada logo partai politiknya. Kemudian nanti partai politik yang akan memilih kader-kadernya untuk menjadi wakil

rakyat, lalu dalam **penetapan calon terpilihnya** dimana apabila partai politik tersebut mendapatkan 2 kursi, maka anggota yang memiliki nomor urut 1 dan 2 merupakan anggota terpilih. Dalam **derajat keterwakilannya** sendiri, dimana system proporsional tertutup ini kurang demokratis karena rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakilnya.

Pada **tingkat kesetaraan calon** di system proporsional tertutup, dimana didominasi oleh kader yang mengakar keatas karena kedekatannya dengan elite partai politik, bukan karena dukungan massanya. **Kelebihan dalam system proporsional tertutup** ialah: memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau etnis minoritas karena partai politik yang menentukan calegnya, meminimalisir praktik politik uang. Sedangkan **kekurangan dari system proporsional tertutup** ialah: pemilih tidak punya peran dalam menentukan wakil dari partai mereka, tidak responsive terhadap perubahan yang cukup pesat, menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pascapemilu.

Pada sejarahnya Indonesia baru merasakan PEMILU untuk pertama kalinya pada tahun 1955, sebab secara fundamental Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia membuat sebuah **Maklumat ke-X** mengenai pembentukan sebuah Partai Politik dan mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu untuk yang pertama kalinya di tahun 1955. Akan tetapi, pada tahun 1946 persiapan untuk menyelenggarakan PEMILU masih sangat kurang, karena tidak adanya sebuah aturan main dalam PEMILU, selanjutnya rendahnya stabilitas keamanan negara, dan pada saat itu pemerintah serta rakyat focus mempertahankan kemerdekaan.

Oleh karena itu, PEMILU baru bisa diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, dimana PEMILU tersebut memilih para anggota DPR dan anggota Konstituante di tanggal 25 Desember 1955. Kemudian pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan bahwa “Konstituante dan DPR dibubarkan dan diganti dengan DPR-GR dan kemudian para ketua dari DPR, MPR, BPK & MA diangkat sebagai Menteri”.

Hal tersebut, menjadikan puncak kekosongan ataupun kerapuhan politik Indonesia, maka MPRS pada saat itu menolak pidato NAWAKSARA pada sidang Ke-IV tanggal 22 Juni 1966. Dari polemic yang terjadi dimasa pemerintahan Bung Karno, dimana pada masa ORBA terdapat sebuah dinamika baru yang dapat dibidang mengekang jalannya demokrasi. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 1977, dimana PEMILU pada saat itu terdapat pembaharuan pada UU No.4 Tahun 1975 sebagai pengganti UU No.15 Tahun 1969 tentang pemilihan umum.

Selain itu juga, pada masa ini PEMILU ada pembaharuan pada UU No.5 Tahun 1975 sebagai pengganti UU No.16 Tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan PR, DPR, & DPRD. Kemudian hal yang menjadi krusial pada PEMILU masa ini ialah terbitnya UU No.3 Tahun 1975 tentang Partai Politik. Pada UU tersebut, dimana terdapat pengerucutan Partai Politik menjadi 2 yaitu PDI dan PPP, selain itu di UU ini juga menjadi Golongan Karya sebagai peserta PEMILU.

Pada PEMILU tahun 1982, dimana terdapat sebuah pembaharuan UU No.2 Tahun 1980 sebagai pengganti UU No.4 Tahun 1975 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan perubahan UU tentang PEMILU juga terjadi pada tahun 1987, dimana UU No,2 Tahun 1980

digantikan dengan UU No.1 Tahun 1985. Ketika dipenghujung kekuasaannya Presiden Soeharto mengalami keruntuhan serta protes atas keberlangsungan kekuasaannya selama ini dari masyarakat dan menimbulkan Gerakan Reformasi yang melengserkannya.

Setelah runtuhnya kekuasaan Rezim ORBA, dimana PEMILU tahun 1999 terdapat perubahan terhadap UU No.3 Tahun 1975 digantikan dengan UU No.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan perubahan UU No.3 Tahun 1999 menggantikan UU No,1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum. Pada perhelatan pesta demokrasi tahun ini, dimana untuk pertama kalinya terdapat 48 Partai Politik yang menjadi bagian peserta pada PEMILU 1999.

Kemudian pasca terjadinya Amandemen UUD 1945, PEMILU tahun 2004 merupakan pemilihan yang paling demokratis, sebab untuk pertama kalinya masyarakat dapat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, dan DPRD. Hal tersebut juga masih tetap berjalan hingga saat ini, akan tetapi system PEMILU yang dijalani dari tahun 2004–sekarang ialah system proporsional terbuka. Jadi segala bentuk pemilihan masyarakatlah yang dapat menentukan pilihannya dan tidak dikembalikan lagi kepada Partai Politik seperti di PEMILU tahun 1955 – 1999.

Sedangkan dalam perjalanan pemilu di Indonesia menggunakan system proporsional atau dapat dibilang sebagai *Multi-Member Constituency*, dimana system ini memiliki satu daerah pemilihan untuk memilih beberapa wakil.<sup>5</sup> System proporsional sendiri terbagi menjadi 2, yaitu terdiri dari system proporsional tertutup dan system proporsional terbuka. Kemudian pada sistem proporsional atau yang

---

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, op. cit, Hal. 462.

dikenal sebagai system proporsional representasi atau multi-member representation menawarkan beberapa kursi untuk diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan. Dalam sistem ini suatu kesatuan administratif jumlah suara yang diperoleh setiap partai menentukan jumlah kursi di parlemen. Artinya, rasio perolehan suara antar partai politik sama dengan rasio perolehan kursi dalam parlemen.<sup>6</sup> Pada masa Orde lama

hingga tahun 1999 Indonesia menggunakan system proporsional tertutup, sedangkan dimasa demokrasi modern kini Indonesia menggunakan system proporsional terbuka dalam PEMILU. Selain menggunakan system Proporsional, Indonesia juga menggunakan system Distrik. Pada system Distrik di Indonesia digunakan untuk melakukan pemilihan anggota DPD RI, dimana setiap daerah memiliki jatah perwakilan sebanyak 4.

Pada pasca Reformasi, dimana Indonesia memulai pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Kemudian pada Pemilu 2004, dimana terdapat 24 Partai Politik yang mengikuti kontestasi pemilihan umum di tahun 2004. Di Pemilu 2004 Partai Golkar keluar menjadi pemenangnya dengan mampu meraih suara sebesar 21,57% dengan total kursi DPR yang didapat ialah 127 kursi anggota dewan. Berikut merupakan table jumlah suara dan jumlah kursi Partai Politik di pemilu 2004:

<b>No.</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Suara Pemilu Tahun 2004</b>	<b>Jumlah Kursi DPR RI</b>

<sup>6</sup> Mashad, Dhurorudin, Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol Abri, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), hal 22.

1.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	24.480.757 (21,57%)	127 Kursi
2.	Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-P)	21.026.629 (18,53%)	109 Kursi
3.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	11.989.564 (10,56%)	52 Kursi
4.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9.248.764 (8,15%)	58 Kursi
5.	Partai DEMOKRAT	8.458.825 (7,45%)	56 Kursi
6.	Partai Keadilan Sejahterah (PKS)	8.325.020 (7,34%)	45 Kursi
7.	Partai Amanat Nasional (PAN)	7.313.305 (6,44%)	53 Kursi
8.	Partai Bulan Bintang (PBB)	2.970.487 (2,62%)	11 Kursi
9.	Partai Bintang Reformasi	2.764.998 (2,44%)	14 Kursi
10.	Partai Damai Sejahterah	2.424.654 (2,14%)	13 Kursi

<b>11.</b>	Partai Karya Peduli Bangsa	2.401.223 (2,12%)	2 Kursi
<b>12.</b>	PKPI	425.240 (1,26%)	1 Kursi
<b>13.</b>	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	923.169 (0,81%)	1 Kursi
<b>14.</b>	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	856.221 (0,75%)	1 Kursi

Pada pasca Reformasi memang banyak sekali Partai Politik baru yang bermunculan untuk mengarungi kontestasi pemilu pada tahun 1999 dan 2004, akan tetapi amat sangat disayangkan bahwa hanya 14 Partai Politik saja yang mampu menduduki kursi DPR RI. Kemudian Ketika masuk pada Pemilu Tahun 2009, dimana terdapat 38 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Politik Lokal Aceh. Pada hasil Pemilu Tahun 2009, dimana Partai Demokrat keluar menjadi pemenang dengan perolehan suara sebanyak 21.703.137 atau sebesar 20,85% dengan total mendapatkan 148 jumlah kursi di DPR RI. Berikut di bawah ini merupakan table hasil dari Pemilu Tahun 2009:

<b>No.</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Suara Pemilu Tahun 2009</b>	<b>Jumlah Kursi DPR RI</b>
<b>1.</b>	Partai DEMOKRAT	21.703.137 (20,85%)	148 Kursi

2.	Partai GOLKAR	15.037.757 (14,45%)	106 Kursi
3.	PDI-P	14.600.091 (14,03%)	94 Kursi
4.	PKS	8.206.955 (7,88%)	57 Kursi
5.	PAN	6.254.580 (6,01%)	46 Kursi
6.	PPP	5.533.214 (5,32%)	38 Kursi
7.	PKB	5.416.122 (4,94%)	28 Kursi
8.	Partai GERINDRA	4.646.406 (4,46%)	26 Kursi
9.	Partai HANURA	3.922.870 (3,77%)	17 Kursi

Berbeda dengan Pemilu tahun 2004 dan Pemilu tahun 2009, dimana pada Pemilu tahun 2014 jumlah Partai Politik yang mengikuti kontestasi hanya sebanyak 12 Partai Politik Nasional dan 3 Partai Politik Lokal Aceh. Kemudian Pemilu Tahun 2014 merupakan Pemilu yang ke-11, PDI-P pada Pemilu Tahun 2014 ini keluar menjadi

pemenangnya dengan memperoleh suara sebanyak 23.681.471 atau sebesar 18,95% dengan perolehan kursi DPR RI yang di dapat sebanyak 109 Kursi. Dibawah ini merupakan table perolehan suara dan jumlah kursi yang didapat setiap Partai Politik pada Pemilu Tahun 2014:

No.	Partai Politik	Suara Pemilu Tahun 2014	Jumlah Kursi DPR RI
1.	PDI-P	23.681.471 (18,95%)	109 Kursi
2.	Partai GOLKAR	18.432.312 (14,75%)	91 Kursi
3.	Partai GERINDRA	14.760.371 (11,81%)	73 Kursi
4.	Partai DEMOKRAT	12.728.913 (10,19%)	61 Kursi
5.	PKB	11.298.957 (9,04%)	47 Kursi
6.	PAN	9.481.621 (7,59%)	49 Kursi
7.	PKS	8.480.204 (6,79%)	40 Kursi
8.	Partai NasDem	8.402.812	35 Kursi

		(6,72%)	
<b>9.</b>	PPP	8.157.488	39 Kursi
		(6,53%)	
<b>10.</b>	Partai HANURA	6.579.498	16 Kursi
		(5,26%)	

Ketika terselenggaranya kontestasi Pemilu Tahun 2019, dimana terdapat beberapa Partai Politik baru mengarungi kontestasi Pemilu. Akan tetapi, dimana para Partai Politik yang baru masih sangat minim untuk melakukan persaingan terhadap Partai-Partai Politik yang sudah ada. Seba yang menjadi problematikanya ialah setiap Partai baru tidak memiliki seorang figure dan karakter Partai-nya untuk dikenal oleh masyarakat. oleh karena itu, pada Pemilu Tahun 2019 PDI-P mampu untuk menang Kembali dengan perolehan suara sebanyak 27.503.961 atau sebesar 19,33% dengan memperoleh kursi DPR RI sebanyak 128 kursi. Kemudian dibawah ini merupakan table suara dan perolehan kursi yang didapat oleh Partai Politik di Pemilu 2019:

<b>No.</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Suara Pemilu Tahun 2019</b>	<b>Jumlah Kursi DPR RI</b>
<b>1.</b>	PDI-P	27.503.961 (19,33%)	128 Kursi
<b>2.</b>	Partai GOLKAR	17.299.789 (12,31%)	85 Kursi
<b>3.</b>	Partai GERINDRA	17.596.839	78 Kursi

		(12,57%)	
4.	Partai NasDem	12.661.792 (9,05%)	59 Kursi
5.	PKB	13.570.970 (9,69%)	58 Kursi
6.	Partai DEMOKRAT	10.876.057 (7,77%)	54 Kursi
7.	PKS	11.493.663 (8,21%)	50 Kursi
8.	PAN	9.572.623 (6,84%)	44 Kursi
9.	PPP	6.323.147 (4,52%)	19 Kursi

Pada hasil Pemilu 2014 dan 2019, Partai NasDem merupakan salah satu dari Partai Politik baru yang resmi dibentuk pada 26 Juli 2011 dan telah terverifikasi secara factual dari KPU RI pada 7 Januari 2013.<sup>7</sup> Kemudian pada Pemilu 2014 Partai NasDem berhasil mendapatkan suara sebanyak 8.402.812 (6,72%) dan mendapatkan jumlah kursi DPR-RI periode 2014-2019 sebanyak 35 kursi. Lalu dengan berbagai gebrakan politiknya, Partai NasDem mampu meningkatkan suaranya dalam kontestasi di Pemilu

<sup>7</sup> Partai NasDem, “Sejarah” <https://jateng.nasdem.id/sejarah/>, 28/03/2023, Pukul: 02.42 WIB.

2019 dengan meraup suara sebanyak 12.661.792 (9,05%) dan mendapatkan jumlah kursi DPR-RI periode 2019-2024 sebanyak 59 kursi.

Dalam sebuah kontestasi Pemilu, dimana Partai Politik untuk menarik simpati masyarakat supaya dapat memilihnya biasanya dengan upaya-upaya pembuatan gagasan maupun idea yang memperjuangkan kepentingan masyarakat khalayak umum. Kemudian apabila kita lihat dari Partai NasDem, dimana NasDem walaupun partai politik yang baru hadir dalam kancah kontestasi Pemilu 2014 akan tetapi sebagai Partai Politik baru Partai NasDem sangat konkret untuk mengutamakan gagasan-gagasannya dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Secara terobosan yang dimiliki oleh Partai NasDem, dalam merancang sebuah strategi politiknya untuk persiapan Pemilu 2019 saat itu sangatlah baik dan bagus. Sebab, pada dasarnya partai politik yang mengikuti pemilu 2019 hanya memiliki gagasan yang masih sangat tidak menarik masyarakat. Pada startegi kampanye politiknya, Partai NasDem memberikan sebuah gagasan mengenai “Restorasi Indonesia” Pada Pemilu 2019, dimana Partai NasDem memiliki slogan kampanye “Restorasi”. Kalau kita pahami makna dari Restorasi memiliki sebuah makna yang sifatnya secara fundamental memiliki empat uraian, yang dimana terdapat memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, serta mencerahkan.

Bagi Partai NasDem, Restorasi Indonesia merupakan sebuah bentuk gagasan yang menjadi ciri pembedanya dengan partai politik lainnya. Kemudian Restorasi Indonesia sebagai bentuk Gerakan aktif yang solutif dan mudah untuk di mengerti dalam konteks

untuk melakukan sebuah perbaikan, serta lebih mengutamakan kepentingan public yang berlandaskan *civilization*.

Restorasi Indonesia yang ditawarkan sebagai tagline atau slogan kampanye dari Partai NasDem, merupakan sebuah gagasan untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang ketua partai dalam hal melakukan sebuah perubahan untuk Indonesia. Aktualisasi sebuah partai politik tentu saja tidak boleh memiliki orientasi pada sebuah kebutuhan para *boss catered party*, akan tetapi *people centered party* merupakan hal yang utama untuk diperjuangkan bagi sosok partai politik.

Kampanye mengenai Restorasi Indonesia, Partai NasDem senantiasa memiliki focus dari gagasannya tersebut dalam merubah sebuah tatanan negara. Pada gagasan Restorasi Indonesia, dimana Partai NasDem dengan jelas bahwasannya memiliki focus untuk melakukan Restorasi di bidang Hukum, Adminitrasi, dan kebijakan-kebijakan yang serta merta menguntungkan rakyat, agar para rakyat mengalami kesejahteraan yang merata.

Di Pemilihan Legislatif untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta, dimana Partai NasDem dalam Pileg pertama kalinya di DKI Jakarta mendapatkan 2 kursi yang berada di daerah pemilihan 9 dan 10 yang dimana merupakan daerah Jakarta Barat. Sedangkan untuk daerah pemilihan Jakarta Selatan di dapil 7 dan 8 tidak mendapatkan kursi sama sekali. Oleh karena itu, Partai NasDem melalui DPD Jakarta Selatan melakukan sebuah evaluasi yang sangat penting untuk mendapatkan kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pada pemilihan legislative di tahun 2019, NasDem akhirnya mampu

mendapatkan kursi di Jakarta Selatan dengan jumlah 2 kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Pada konteks ini, dimana perlakuan yang dilakukan oleh DPD Partai NasDem Jakarta Selatan ialah menjadikan sebuah jembatan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang hadir di wilayah Jakarta Selatan. Kebutuhan-kebutuhan yang diminta oleh para warga Jakarta Selatan yang tidak pernah diterima, kemudian diajukanlah oleh DPD Partai NasDem Jakarta Selatan contohnya seperti pengajuan beasiswa KJP, bantuan sosial, dan pengaspalan jalanan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Partai Politik yang mampu untuk memanfaatkan gagasan kampanye dalam ranah branding serta menaikkan elektabilitas suaranya. Penulis mengangkat permasalahan tentang “Bagaimana Strategi Partai NasDem dalam Meningkatkan Suara di Wilayah Jakarta Selatan Pada Pemilu Tahun 2019?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam konteks penelitian kali ini, penulis ingin memberikan sebuah pengetahuan mengenai seberapa pengaruhnya strategi atau pola kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik dalam mengarungi kontestasi di Pemilu itu sendiri. Maka dari itu, dimana penulis meneliti mengenai pengaruh strategi atau pola kampanye dalam meningkatkan suara Partai NasDem di kontestasi Pemilu Tahun 2019. Karena secara di tahun 2014 Partai NasDem mendapatkan suara sebesar 8.402.812 (6,72%), oleh karena itu penulis ingin mengetahui apa saja yang menjadi factor utamanya dan bagaimana cara Partai NasDem dalam memanfaatkan media digitalnya untuk membranding Partainya.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana ada dua kegunaan yang dimana terdapat dibawah ini:

- Kegunaan Akademis, secara tertulis peneliti berharap mendapatkan kebermanfaatan dalam pengalaman secara ilmu di Prodi Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta. Secara teoritis tentu peneliti ingin bisa mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama kuliah di Jurusan.
- Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta dan dapat digunakan sebagai suatu bekal ketika bekerja
- Kegunaan Praktis, tentu hal ini sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan nilai mata kuliah seminar politik di Program Studi Ilmu Politik. Kegunaan praktis lainnya ialah sebagai salah satu ide bagi diri sendiri atau orang lain ketika ingin maju dalam pemilihan umum serentak.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang sudah diangkat dengan berjudul Strategi Partai NasDem Terhadap Peningkatan Suara Pada Pemilu 2019 “STUDY Kasus: Jakarta Selatan” untuk selanjutnya penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Di bab pertama ini, penulis menjelaskan mengenai sebuah latar belakang suatu permasalahan yang diangkat serta dapat menerangkan rumusan masalah

secara konkret agar dapat mengetahui strategi kampanye seperti apa yang dilakukan oleh Partai NasDem dalam meningkatkan suaranya. Terutama dalam konteks Pemilu 2019

- **BAB II KERANGKA PEMIKIRAN**

Di dalam bab ini, dimana akan terdapat sebuah gambaran bagaimana penulis dapat menganalisa sebuah permasalahan penelitian menggunakan teori serta konseptual yang penulis gunakan. Sebab, secara fundamentalnya di dalam penulisan ilmiah penulis harus menulis dengan sebuah landasan dasar yang jelas agar penelitian yang dilakukan oleh penulis wujudnya tidak mengarah pada subjektivitas. Bab ini juga terdapat kajian terdahulu atau tinjauan Pustaka terdahulu agar penulis dapat leluasa untuk memahami kondisi permasalahan yang di angkat.

- **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini penulis menjelaskan secara sederhana mengenai pendekatan kualitatif yang akan digunakan, jenis penelitian, pengumpulan data sebagai pisau analisis ketika turun lapangan. Kemudian menjelaskan teknis yang dilakukan ketika melakukan analisis terhadap data yang nantinya dikumpulkan.

- **BAB IV GAMBARAN UMUM**

Pada Bab ini, dimana penulis menjabarkan ataupun mendeskripsikan mengenai Partai NasDem, mulai dari historisnya sampai perjalanan hingga lika-liku organisasi serta perannya terhadap bangsa Indonesia. Kemudian juga, penulis

pada bab ini medeskripsikan tentang strategi kampanye yang dimiliki Partai NasDem dalam meningkatkan suara di Pemilu 2019.

- **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab kali ini, dimana penulis menjelaskan serta menyertakan hasil penelitian penulis secara konkret mengenai strategi kampanye politik yang menjadi aktualisasi gagasan yang diciptakan oleh Partai NasDem dalam meningkatkan suaranya pada Pemilu 2019. Kemudian di lain hal, penulis juga tidak lupa untuk menganalisa hasil dari penelitian lapangan yang telah dilakukan.

- **BAB VI KESIMPULAN**

Bab ini merupakan ujung dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pola strategi Partai NasDem dalam konteks peningkatan suaranya pada kontestasi Pemilu 2019. Maka dari itu, segala hasil dan analisis pada penelitian dapat ditarik sebagai kesimpulan yang jelas dan secara factual pada kondisi realita yang ada di lingkup wilayah Jakarta Selatan.